

# WDP Masih Hantui Kota Semarang

Kasus Hilangnya Uang Deposito Rp22,7 Miliar Diduga Jadi Pemicu Utama

**SEMARANG** – DPRD Kota Semarang menilai pengelolaan keuangan Pemkot terancam selalu memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dalam beberapa tahun ke depan.

Hal itu terjadi apabila proses penanganan hilangnya kas daerah senilai Rp22,7 miliar tidak mampu diselesaikan dalam waktu cepat.

Wakil Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 DPRD Kota Semarang, Ari Purbono mengatakan, hilangnya kas daerah Rp22,7 miliar menjadi penyebab utama diperolehnya WDP. Kasus ini dipastikan akan menjadi momok bagi Pemkot lima tahun ke depan apabila tidak mampu diselesai-

kan oleh pemerintahan saat ini.

“Peristiwa ini akan menjadi momok pemerintahan selanjutnya (pemerintahan saat ini akan berakhir 19 Juli) jika tidak selesai karena dalam pengelolaan keuangannya, pemerintahan lima tahun ke depan tidak akan pernah meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya se usai memimpin rapat pansus kemarin.

Tidak selesainya kasus hilangnya kas daerah Rp22,7 miliar akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan keuangan Pemkot Semarang. Sebab, nanti sebaik-

apa pun perubahan pengelolaan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan menjadi muspro. Hilangnya uang Rp22,7 miliar itu tetap akan menjadi catatan kehilangan dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Nantinya SKPD sebaik apapun pengelolaannya, tapi uang Rp22,7 miliar ini tidak selesai, maka kinerjanya akan muspro. Karena uang Rp22,7 miliar tetap akan dianggap kehilangan. Tentu saja ini adalah kerugian besar bagi jalannya pemerintahan Kota Semarang,” tandas Ari.

Pansus telah membuat langkah-langkah upaya untuk laporan pengelolaan keuangan Pemkot Semarang bisa kembali meraih WTP. Upaya pansus ini karena langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkot Semarang masih

sangat standar dan belum ada hal yang mendasar untuk dilakukan.

Pansus nantinya akan mendorong adanya regulasi penempatan kas daerah di perbankan melalui kajian. Selama ini hal itu belum pernah ada kajiannya. “Dengan adanya kajian sehingga bisa menghindari kasus hilang kas daerah terulang,” ujar Ari.

Dia juga menilai langkah hukum yang dilakukan Pemkot Semarang belum serius agar menang diproses gugatan di pengadilan. Ari akan mendorong agar Pemkot mencari advokat atau pengacara yang lebih berpengalaman dan berkualitas misalnya pengacara, Yusril Ihza Mahendra.

“Jika Pemkot serius, Dewan juga berjanji akan menyepakati penyediaan anggaran untuk kasus seperti ini yang lebih besar. Sebab, ketidakseriusan Pemkot ter-

lihat juga dalam penganggaran yang hanya 200 juta. Kami juga meminta agar integritas sumber daya manusia di Pemkot ditingkatkan,” tandasnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang Yudi Mardiana meminta masalah kehilangan uang Rp22,7 miliar ini dilihat secara menyeluruh dari awal. Dalam kasus ini pihaknya justru yang menemukan adanya kehilangan uang. Bahkan, dia telah melakukan terobosan-terobosan dalam pengelolaan kas daerah.

Yudi juga telah melakukan gugatan secara perdata untuk menangani kasus ini. Dia berharap akan ada hasil yang menggembirakan karena merasa sudah bekerja maksimal sesuai standar operasi. “Tentu saja kami juga sangat berharap uang Rp22,7 miliar ini bisa secepat-

nya ditemukan dan dikembalikan ke kas daerah,” ungkapnya.

Kepala Inspektoran Kota Semarang Cahyo Bintarum mengakui kasus hilangnya dana Rp22,7 miliar menjadi penyebab utama laporan keuangan daerah tahun 2014 dengan predikat WDP. Dia mengaku sudah melakukan upaya mediasi antara Pemkot dan BTPN tapi gagal. Kemudian dilanjutkan dengan gugatan Pemkot ke BTPN di pengadilan. Harapannya, melalui proses pengadilan ini masalah ini bisa diselesaikan. Uang Rp22,7 miliar bisa dikembalikan ke kas daerah.

Dia juga mengakui proses di pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap (*incraht*) untuk mengetahui siapa yang salah dan apakah uangnya dikembalikan, akan cukup lama sekitar empat sampai lima tahun.

• m abduh